

**PENGARUH PAJAK DAERAH TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI
MELALUI BELANJA MODAL SEBAGAI VARIABEL INTERVENING
DI KOTA SEMARANG PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2019-2023**

Noveandro Dwi Adhiyaksa

NPP. 32.0460

Asdaf Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah

Program Studi Pembangunan Ekonomi

dan Pemberdayaan Masyarakat

Email: 32.0460@ipdn.ac.id

Pembimbing Skripsi: Dr. Muhammad Faisal, S.Pd., M.Pd

ABSTRACT

Problem Statment/Background (GAP) The Covid-19 pandemic caused a sharp decline in both local tax revenues and capital expenditures in Semarang City during 2020–2021, exposing the fragility of regional funding. Although local tax receipts have generally trended upward, the capacity of capital spending to stimulate economic growth appears misaligned, suggesting an underutilization of fiscal tools.

Purpose: This study aims to analyze the effect of local taxes on economic growth with capital expenditure as an intervening variable (mediation) in Semarang City, Central Java Province, in the 2019-2023 period. **Method:** This research uses a quantitative approach with simple linear regression analysis method and Sobel test to test the mediating role. The data used is secondary data obtained from the APBD financial report, the Central Statistics Agency (BPS), and related agencies, including the realization of local taxes, capital expenditures, and Gross Regional Domestic Product (GRDP). **Result:** The results showed that local taxes have a positive and significant influence on economic growth ($R^2 = 0.915$; $p\text{-value} = 0.011$). However, the relationship between local taxes and capital expenditure ($R^2 = 0.382$; $p\text{-value} = 0.267$), as well as the relationship between capital expenditure and economic growth ($R^2 = 0.538$; $p\text{-value} = 0.158$), is not significant. The Sobel test yielded a value of $Z = 1.10$ with a $p\text{-value} = 0.135$, indicating that capital expenditure does not act as an effective mediator in the relationship between local taxes and economic growth. **Conclusion:** Although local taxes are proven to contribute directly to economic growth, capital expenditure has not functioned optimally as an intervening variable. Therefore, it is necessary to increase the allocation of capital expenditure to productive sectors, improve the transparency of budget management, and evaluate fiscal policy to strengthen the long-term impact on regional economic development.

Keywords: local taxes, capital expenditure, economic growth, intervening variable, Semarang City

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Penurunan realisasi pajak daerah dan belanja modal yang signifikan selama tahun 2020–2021 mencerminkan ketidakstabilan pendanaan daerah akibat pandemi Covid-19. Ketidaksejajaran antara tren peningkatan pajak daerah dan efektivitas belanja modal dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah menunjukkan adanya celah (gap) dalam pemanfaatan belanja modal sebagai instrumen fiskal. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai peran belanja modal dalam menjembatani pengaruh pajak daerah terhadap pertumbuhan ekonomi, khususnya di Kota Semarang. **Tujuan:** Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pajak daerah terhadap pertumbuhan ekonomi dengan belanja modal sebagai variabel *intervening* (mediasi) di Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah, pada periode 2019–2023. **Metode:** Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode analisis regresi linear sederhana dan uji Sobel untuk menguji peran mediasi. Data yang digunakan merupakan data sekunder yang diperoleh dari laporan keuangan APBD, Badan Pusat Statistik (BPS), dan instansi terkait, meliputi realisasi pajak daerah, belanja modal, dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). **Hasil/Temuan:** menunjukkan bahwa pajak daerah memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi ($R^2 = 0,915$; $p\text{-value} = 0,011$). Namun, hubungan antara pajak daerah dan belanja modal ($R^2 = 0,382$; $p\text{-value} = 0,267$), serta hubungan antara belanja modal dan pertumbuhan ekonomi ($R^2 = 0,538$; $p\text{-value} = 0,158$), tidak signifikan. Uji Sobel menghasilkan nilai $Z = 1,10$ dengan $p\text{-value} = 0,135$, yang menunjukkan bahwa belanja modal tidak berperan sebagai mediator yang efektif dalam hubungan antara pajak daerah dan pertumbuhan ekonomi. **Kesimpulan:** Meskipun pajak daerah terbukti memberikan kontribusi langsung terhadap pertumbuhan ekonomi, belanja modal belum berfungsi optimal sebagai variabel *intervening*. Oleh karena itu, perlu dilakukan peningkatan alokasi belanja modal pada sektor-sektor produktif, perbaikan transparansi pengelolaan anggaran, serta evaluasi kebijakan fiskal untuk memperkuat dampak jangka panjang terhadap pembangunan ekonomi daerah.

Kata Kunci: Pajak Daerah, Belanja Modal, Pertumbuhan Ekonomi, Variabel *Intervening*, Kota Semarang.

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pembangunan ekonomi merupakan upaya berkelanjutan yang melibatkan berbagai pihak, terutama pemerintah daerah, untuk meningkatkan kondisi wilayah melalui pengembangan potensi ekonomi lokal. Pasal 12 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 menegaskan bahwa pemerintah daerah memiliki tanggung jawab untuk mengoptimalkan potensi tersebut, sehingga mampu mendorong pertumbuhan ekonomi sesuai dengan kondisi spesifik masing-masing wilayah (Djadjuli, 2021; Lestari et

al., 2021).

Pandemi Covid-19 memberikan dampak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, terutama di Kota Semarang, yang merupakan salah satu kontributor utama Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Provinsi Jawa Tengah. Penurunan tajam pada tahun 2020 diakibatkan oleh kebijakan pembatasan sosial dan langkah-langkah kesehatan yang diterapkan untuk menanggulangi penyebaran virus, meskipun kondisi ini berhasil diperbaiki secara bertahap pada tahun-tahun berikutnya melalui upaya Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) (Nugroho *et al.*, 2021; BPS, 2022).

Pajak daerah merupakan sumber pendapatan utama yang penting untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Meskipun sempat turun di awal pandemi, penerimaan pajak meningkat signifikan dalam beberapa tahun terakhir (rata-rata 10,87%), memperkuat perannya sebagai pendorong belanja modal untuk infrastruktur. Belanja modal ini berdampak langsung pada ekonomi dan produktivitas sektor strategis. Data BPS Kota Semarang menunjukkan penurunan belanja modal selama pandemi, tetapi naik signifikan saat pemulihan, mencerminkan kebijakan pemerintah yang memprioritaskan proyek-proyek penting untuk pemulihan ekonomi pasca-pandemi. (Rozy *et al.*, 2022; Utami & Masyitah, 2023).

1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP)

Penelitian ini memperkenalkan belanja modal sebagai variabel intervening yang diuji dengan uji Sobel, berbeda dari studi terdahulu yang hanya mengkaji hubungan langsung ketiga variabel tanpa meneliti mekanisme mediasi. Metodologi menggabungkan regresi linear sederhana untuk pengaruh langsung dengan *path analysis*, sedangkan penelitian sebelumnya umumnya hanya menggunakan regresi berganda atau sederhana tanpa analisis mediasi eksplisit. Konteks kajian adalah kebijakan fiskal pasca-pandemi Covid-19 di Kota Semarang, sedangkan studi lain lebih banyak berfokus pada wilayah Aceh, Tasikmalaya, atau

Gerbangkertokusila dengan kerangka kebijakan yang berbeda.

Dengan data sekunder APBD Kota Semarang 2019–2023 (realisasi pajak, belanja modal, PDRB), penelitian ini menawarkan kedalaman lokal lebih spesifik dibandingkan studi yang berfokus pada satu kabupaten atau kawasan regional. Objek analisis ditetapkan pada unit pemerintahan kota, bukan unit usaha atau provinsi, sehingga menghasilkan skala dan karakteristik sampel yang lebih jelas. Selain itu, rentang waktu penelitian mencakup kondisi pra-, selama, dan pasca-pandemi, suatu cakupan temporal yang belum diakomodasi dalam studi sebelumnya. Dengan demikian, penelitian ini menghadirkan novelty lewat pendekatan mediasi, konteks lokal dan cakupan temporal-spasial yang lebih komprehensif.

1.3. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini terinspirasi dari sejumlah studi sebelumnya yang mengeksplorasi hubungan antara variabel fiskal daerah dan pertumbuhan ekonomi. Prawiroyudo (2023) dalam artikel *“The Influence Of Economic Growth, Regional Original Revenue, General Allocation Fund And Special Allocation Fund On Capital Expenditure Budget allocation (Empirical Study On Regency And City Governments Throughout Indonesia In 2018–2021)”* yang terbit di *Management Studies and Entrepreneurship Journal*, menganalisis data panel seluruh kabupaten/kota di Indonesia (2018–2021) dan menemukan bahwa pertumbuhan ekonomi, Pendapatan Asli Daerah (PAD), serta Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh positif signifikan terhadap alokasi belanja modal, sementara Dana Alokasi Khusus (DAK) memiliki efek yang bervariasi tergantung prioritas sektor daerah.

Alfaris *et al.* (2023), dalam studi *“Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) ke-8: Studi Kasus di Jawa Tengah”** yang dipublikasikan di *Journal of Comprehensive Science*, mengungkapkan bahwa meski pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah memenuhi target nasional, disparitas ketenagakerjaan dan produktivitas antarwilayah masih tinggi, sehingga diperlukan kebijakan fiskal dan investasi modal yang lebih terarah

untuk pemerataan. Yurianto & Tantowi (2021) dalam penelitian “Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi DKI Jakarta” di *Journal of Applied Business and Economics*, menggunakan data deret waktu DKI Jakarta (2016–2020) dan membuktikan bahwa peningkatan penerimaan pajak daerah berkorelasi positif signifikan dengan pertumbuhan ekonomi, menegaskan pentingnya optimalisasi PAD dalam kerangka otonomi fiskal.

Di sisi lain, Arifin & Saputra (2022), dalam artikel “*Effect of Local Revenue and Capital Expenditures on Regional Economic Growth in Indonesia*” yang terbit di *International Journal of Economics, Business and Accounting Research*, menganalisis data panel 34 provinsi (2015–2020) dan menyimpulkan bahwa PAD berpengaruh langsung pada pertumbuhan ekonomi, sementara belanja modal baru berdampak signifikan dalam jangka panjang, menekankan pentingnya pengelolaan fiskal yang efektif.

Maryani *et al.* (2023), dalam penelitian “Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Pertumbuhan Ekonomi Melalui Belanja Modal di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2007-2021” menggunakan pendekatan kuantitatif dan menemukan bahwa pajak daerah berpengaruh langsung terhadap pertumbuhan ekonomi, tetapi belanja modal berperan sebagai mediator parsial, sehingga alokasi modal yang tepat sasaran menjadi kunci optimalisasi dampak fiskal.

1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penelitian ini membawa kebaruan dengan mengkaji secara simultan dan longitudinal bagaimana interaksi antara pajak daerah, belanja modal, dan pertumbuhan ekonomi memengaruhi proses pembangunan ekonomi Kota Semarang selama fase pra, saat, dan pasca pandemi Covid-19 (2019–2023). Berbeda dari studi sebelumnya, penelitian ini tidak hanya menilai dampak angka makro, tetapi juga menelusuri mekanisme peran belanja modal sebagai pendorong sektor-sektor produktif dan infrastruktur strategis yang krusial bagi kesinambungan dan kualitas pembangunan ekonomi di

tengah tantangan pemulihan pascapandemi.

1.5. Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pajak daerah terhadap pertumbuhan ekonomi di Kota Semarang dengan belanja modal sebagai variabel mediasi.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif berbasis positivisme untuk menganalisis pengaruh pajak daerah terhadap pertumbuhan ekonomi dengan belanja modal sebagai variabel *intervening* di Kota Semarang. Data yang digunakan bersumber dari dokumen sekunder, seperti laporan APBD, realisasi pendapatan pajak daerah, dan indikator pertumbuhan ekonomi (PDRB) yang diperoleh dari BPS dan instansi pemerintah terkait, dengan pengambilan sampel menggunakan teknik purposive sampling dari periode 2019 hingga 2023. Selanjutnya, analisis data dilakukan dengan uji statistik deskriptif dan inferensial, termasuk regresi linier sederhana serta pengujian asumsi klasik seperti normalitas, heteroskedastisitas, dan autokorelasi menggunakan perangkat lunak SPSS versi 27 untuk memastikan validitas dan reliabilitas model yang dibangun.

Analisis dalam penelitian ini dimulai dengan uji statistik deskriptif untuk menggambarkan karakteristik awal variabel seperti pajak daerah, belanja modal, dan pertumbuhan ekonomi, yang dilanjutkan dengan analisis inferensial menggunakan regresi linier sederhana untuk menguji hubungan kausal antar variabel. Selain itu, penelitian ini juga menerapkan uji asumsi klasik termasuk normalitas, heteroskedastisitas, dan autokorelasi menggunakan SPSS versi 27 guna memastikan validitas model regresi yang dibangun. Uji Sobel pun diaplikasikan untuk menganalisis signifikansi peran belanja modal sebagai variabel *intervening*, sehingga dapat diketahui apakah pengaruh pajak daerah terhadap pertumbuhan ekonomi terjadi secara langsung maupun tidak langsung melalui belanja modal.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Hasil Uji Regresi Linear Sederhana

Tabel Hasil Uji Regresi Linear Sederhana

Variabel	R ²	<i>p-value</i>	Kontsanta	Koef. Regresi	Std. Error
Pajak Daerah – Pertumbuhan Ekonomi	0,915	0,011	1.008E+14	27,865	4,905
Belanja Modal – Pertumbuhan Ekonomi	0,538	0,158	1.219E+14	28,299	15,136
Pajak Daerah – Belanja Modal	0,382	0,267	1.354E+11	0,467	0,343

Tabel hasil uji regresi linear sederhana menyajikan hasil uji untuk menganalisis hubungan antara variabel Pajak Daerah, Belanja Modal, dan Pertumbuhan Ekonomi. Analisis ini bertujuan mengukur sejauh mana variabel independen (Pajak Daerah dan Belanja Modal) mampu menjelaskan variasi variabel dependen (Pertumbuhan Ekonomi dan Belanja Modal), serta signifikansi statistik dari hubungan tersebut.

Hasil analisis regresi menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang sangat kuat antara Pajak Daerah dan Pertumbuhan Ekonomi, dengan nilai determinasi (R^2) sebesar 0,915. Hubungan ini signifikan secara statistik ($p\text{-value} = 0,011$), di mana setiap peningkatan Pajak Daerah berkontribusi pada kenaikan Pertumbuhan Ekonomi sebesar 27,865 satuan. Hubungan antara Belanja Modal dan Pertumbuhan Ekonomi memiliki tingkat determinasi moderat ($R^2 = 0,538$), tetapi tidak signifikan secara statistik ($p\text{-value} = 0,158$). Pajak Daerah dan Belanja Modal tergolong lemah ($R^2 = 0,382$) dan tidak signifikan ($p\text{-value} = 0,267$).

3.2. Hasil Uji Sobel

Diketahui:

$a = 0,467$

$b = 28.299$

$SEb = 15,136$

$SEa = 0,343$

Hasil:

$$Z = \frac{a \times b}{\sqrt{(b^2 \times SEa^2) + (a^2 \times SEb^2)}}$$
$$Z = \frac{0,467 \times 28299}{\sqrt{(28.299^2 \times 0,343^2) + (0,467^2 \times 15,136^2)}}$$
$$Z = \frac{13,215}{\sqrt{94,217 + 49,96}}$$
$$Z = \frac{13,215}{\sqrt{144,177}}$$
$$Z = \frac{13,215}{12,003}$$
$$Z = 1,10061084$$

Sobel test statistic : 1,10061084

One-tailed probability: 0.13553303

Two-tailed probability: 0.27106607

Hasil uji Sobel menunjukkan bahwa belanja modal tidak menjadi variabel mediasi yang signifikan dalam hubungan antara pajak daerah dan pertumbuhan ekonomi. Hal ini ditunjukkan oleh nilai Z sebesar 1,1006 dan probabilitas satu arah sebesar 0,1355, yang melebihi tingkat signifikansi 5%. Karena hipotesis bersifat direksional, digunakan uji satu arah. Dengan demikian, belanja modal tidak secara signifikan memediasi pengaruh pajak daerah terhadap pertumbuhan ekonomi.

3.3. Pembahasan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pajak daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Kota Semarang ($R^2 = 0,915$; $p\text{-value} = 0,011$). Temuan ini mengindikasikan bahwa kebijakan pemungutan pajak daerah berhasil menjadi sumber pendapatan utama

untuk mendanai program pembangunan, yang pada gilirannya meningkatkan aktivitas ekonomi. Efektivitas digitalisasi sistem perpajakan, seperti SPTPD *online* dan transparansi alokasi anggaran, menjadi faktor kunci dalam memaksimalkan fungsi *budgetair* dan *regulerend* pajak.

Penurunan tajam pertumbuhan ekonomi pada 2020 (-1,61%) menjadi bukti nyata dampak pandemi terhadap perekonomian Kota Semarang. Kebijakan pembatasan sosial dan realokasi anggaran ke sektor kesehatan mengurangi kapasitas belanja modal, yang berimbas pada kontraksi PDRB. Hal ini memperkuat argumen bahwa guncangan eksternal dapat mengganggu stabilitas fiskal dan pertumbuhan ekonomi, meskipun pemulihan mulai terlihat pada 2021-2023.

Meskipun pajak daerah memiliki korelasi positif dengan belanja modal (koefisien regresi = 0,467), hubungan ini tidak signifikan secara statistik ($p\text{-value} = 0,267$). Fenomena ini dapat dijelaskan melalui prioritas anggaran selama pandemi, di mana belanja operasional (seperti kesehatan dan bantuan sosial) mendominasi alokasi dana. Selain itu, insentif fiskal yang berfokus pada kepatuhan wajib pajak, bukan ekspansi belanja modal, turut mengurangi pengaruh langsung pajak terhadap investasi infrastruktur.

Belanja modal menunjukkan pengaruh positif namun tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi ($p\text{-value} = 0,158$). Penyebabnya antara lain penundaan proyek strategis seperti LRT dan pembangunan Pasar Johar selama pandemi, yang belum memberikan dampak ekonomi riil. Selain itu, dominasi sektor perdagangan dan jasa dalam struktur PDRB Kota Semarang membuat pertumbuhan lebih bergantung pada konsumsi rumah tangga dan investasi swasta daripada belanja pemerintah.

Uji Sobel mengonfirmasi bahwa belanja modal tidak berperan sebagai mediator signifikan ($Z = 1,10$; $p\text{-value} = 0,135$). Hal ini mengindikasikan bahwa mekanisme alokasi pajak daerah ke belanja modal belum optimal dalam menciptakan *multiplier effect* ekonomi. Proyek infrastruktur yang tertunda atau tidak terawat, seperti Jembatan Kaca Tinjomoyo, menjadi contoh konkret ketidakefektifan belanja modal dalam

mendorong pertumbuhan jangka pendek.

Kebijakan *refocusing* anggaran tahun 2020-2021 untuk penanganan COVID-19 mengalihkan dana dari belanja modal ke sektor kesehatan dan sosial. Akibatnya, realisasi belanja modal turun drastis (-58,36% pada 2020), yang melemahkan kapasitas pemerintah dalam membangun infrastruktur produktif. Kondisi ini memperlihatkan kerentanan sistem fiskal daerah terhadap krisis yang memaksa perubahan prioritas anggaran.

Struktur ekonomi Kota Semarang yang didominasi sektor perdagangan dan jasa (54% kontribusi PDRB) membuat pertumbuhan kurang responsif terhadap belanja modal. Sektor industri pengolahan yang hanya menyumbang 28% PDRB mengindikasikan perlunya realokasi belanja modal ke sektor yang lebih produktif, seperti pengembangan kawasan industri atau teknologi, untuk menciptakan dampak jangka panjang.

3.4. Diskusi Temuan Utama Penelitian

Temuan ini memperkaya diskusi teoritis tentang desentralisasi fiskal dan pertumbuhan ekonomi. Meskipun teori Solow (1956) menekankan pentingnya akumulasi modal, implementasinya di Kota Semarang terhambat oleh faktor eksternal (pandemi) dan prioritas kebijakan. Teori keagenan juga relevan, di mana konflik kepentingan antara wajib pajak dan pemerintah dalam pengelolaan anggaran dapat mengurangi efektivitas belanja modal.

Pemerintah Kota Semarang perlu meningkatkan transparansi alokasi pajak daerah melalui platform digital *real-time* untuk memastikan belanja modal tepat sasaran. Proyek infrastruktur seperti pengendalian banjir dan transportasi massal harus diprioritaskan, disertai evaluasi berkala terhadap dampaknya. Selain itu, kolaborasi dengan sektor swasta melalui skema KPBU (Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha) dapat mempercepat pembangunan infrastruktur strategis.

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa belanja modal belum

mampu memediasi hubungan antara pajak daerah terhadap pertumbuhan ekonomi secara signifikan. Berbeda dengan temuan penelitian Prawiroyudo (2023), hasilnya menunjukkan bahwa belanja modal merupakan saluran penting dalam menyalurkan dampak pendapatan daerah terhadap pembangunan ekonomi, terutama jika belanja tersebut dialokasikan untuk sektor produktif. Temuan ini juga tidak sejalan dengan hasil penelitian Maryani *et al.* (2023), yang menemukan bahwa belanja modal mampu memediasi secara signifikan pengaruh PAD terhadap pertumbuhan ekonomi di wilayah Tanjung Jabung Timur.

Kemudian penelitian oleh Alfaris *et al.* (2023) menyoroti dampak negatif pajak akibat alokasi tidak produktif. Perbedaan ini menegaskan pentingnya konteks lokal dalam analisis kebijakan fiskal, di mana efektivitas pajak dan belanja modal sangat bergantung pada kondisi geografis, struktur ekonomi, dan kapasitas kelembagaan daerah. Namun hasil penelitian sejalan dengan Miswar *et al.* (2021) yang menemukan pengaruh positif pajak daerah terhadap pertumbuhan ekonomi.

Penelitian Junaidi *et al.* (2020), menunjukkan bahwa dalam situasi darurat seperti pandemi COVID-19, pemerintah daerah melakukan *refocusing* anggaran berdasarkan Instruksi Presiden, namun dasar hukum ini dinilai lemah dan rawan disalahgunakan. Oleh karena itu, dibutuhkan Perppu sebagai landasan hukum yang lebih kuat untuk menjamin akuntabilitas kebijakan keuangan daerah. Selain penguatan regulasi, pemerintah juga perlu merancang kebijakan inovatif seperti insentif pajak bagi UMKM, investasi dalam ekonomi hijau, serta pemanfaatan *big data* dan teknologi AI untuk mendukung belanja modal yang tepat sasaran. Upaya ini penting agar Kota Semarang dapat mewujudkan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan melalui kolaborasi lintas sektor.

IV. KESIMPULAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pajak daerah memiliki pengaruh positif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Semarang, didukung oleh kebijakan digitalisasi dan transparansi pajak. Meskipun

terdapat hubungan positif antara pajak daerah dan belanja modal, signifikansi tidak tercapai karena anggaran lebih diprioritaskan pada belanja operasional dan refocusing selama pandemi. Belanja modal sendiri berkontribusi positif namun tidak signifikan terhadap pertumbuhan akibat keterlambatan realisasi, alokasi yang kurang tepat sasaran, dan pergeseran fokus ke sektor kesehatan dan sosial. Akibatnya, belanja modal gagal memediasi secara signifikan hubungan antara pajak daerah dan pertumbuhan ekonomi. Temuan ini menegaskan kebutuhan realokasi belanja modal ke proyek strategis dengan efek multiplier tinggi untuk menciptakan dampak ekonomi berkelanjutan.

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini hanya mencakup periode 2019–2023 sehingga tidak mampu mengungkap tren jangka panjang atau dampak struktural kebijakan pajak dan belanja modal. Data sekunder yang bersumber dari BPS dan laporan APBD serta fokus eksklusif pada Kota Semarang membatasi kemampuan generalisasi temuan ke daerah lain. Selain itu, penggunaan regresi linier dan uji Sobel mungkin kurang mampu menangkap kompleksitas hubungan variabel di tengah gangguan eksternal seperti pandemi Covid-19.

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*). Disarankan memperluas cakupan periode dan wilayah serta menerapkan metode campuran dan teknik ekonometrika lanjutan untuk menangkap kompleksitas hubungan variabel. Pemerintah daerah sebaiknya realokasikan belanja modal ke proyek strategis berdampak multiplier tinggi dan percepat realisasi anggaran.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih penulis sampaikan kepada Dr. Muhammad Faisal, S.Pd., M.Pd., selaku dosen pembimbing, atas bimbingan, arahan, serta dukungan yang telah diberikan selama proses penelitian dan penyusunan artikel ilmiah ini sehingga penelitian ini dapat diselesaikan dengan baik.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Alfaris, R. D., Rustam, R., & Syafri. (2023). Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sdgs) Ke-8: Studi Kasus Di Jawa Tengah. *Journal of Comprehensive Science*, 2(2), 2962–4584. <https://doi.org/10.59188/jcs.v2i2.237>
- Arnan, S. G., Oki, I., Brata, D., & Mulyati, Y. (2014). The Effect of Local Government Revenue and Capital Expenditures on Economic growth (Case Study of the City / Regency Government of West Java Province. *International Journal of Psychosocial Rehabilitation*, 24, 2020. <https://www.psychosocial.com/index.php/ijpr/article/download/2801/2578/5170>
- Arifin, M. A., & Razali, R. (2022). The ABC of Needs Study: A Mixed-Methods Approach for Instrument Development. *International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences*, 12(10). <https://doi.org/10.6007/ijarbss/v12-i10/15047>
- BPS Kota Semarang. (2022). Kota Semarang Dalam Angka 2022. BPS. <https://pustakadata.semarangkota.go.id/katalog/buku/438>
- Djadjuli, D. (2021). Peran Pemerintah Dalam Pembangunan Ekonomi Daerah. *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara*, 5(2), 8–21.. <http://dx.doi.org/10.25157/dinamika.v5i2.1409>
- Gampu, J. L., & Romarina, A. (2024). *PENGARUH BELANJA MODAL TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DI KOTA BITUNG PROVINSI SULAWESI UTARA* (Doctoral dissertation, IPDN). <http://eprints.ipdn.ac.id/id/eprint/19394>
- Hall, J. L., & Kanaan, D. Z. (2021). State tax policy, municipal choice, and local economic development outcomes: A structural equation modeling approach to performance assessment. *Public Administration Review*, 81(3), 459-474. <https://doi.org/10.1111/puar.13165>

- Junaidi, M., Sukarna, K., Arifin, Z., & Soegianto, S. (2020). Kebijakan *Refocusing* Anggaran Belanja Daerah dalam Penanganan Pandemi COVID-19. *Halu Oleo Law Review*, 4(2), 145-156. <http://dx.doi.org/10.33561/holrev.v4i2.14096>
- Kristiyanti, L., & Dewi, M. W. (2021). Analisa Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dana Perimbangan, Serta Pengaruhnya Terhadap Belanja Modal (Studi Kasus Pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016-2018). *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*, 21(2), 424–431. <https://doi.org/10.29040/jap.v21i2.1509>
- Lestari, N., Pasha, P. A., Oktapianti, M., & Noviarita, H. (2021). Teori Pembangunan Ekonomi. *REVENUE: Jurnal Manajemen Bisnis Islam*, 2(2), 95–112. <https://doi.org/10.24042/revenue.v2i2.9071n>
- Maulina, A., Alkamal, M., & Fahira, N. S. (2021). PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH, DANA PERIMBANGAN, BELANJA MODAL, DAN UKURAN PEMERINTAH DAERAH TERHADAP KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH. *Journal of Information System, Applied, Management, Accounting and Research*, 5(2), 390. <https://doi.org/10.52362/jisamar.v5i2.373>
- Maryani, M., Zamzami, Z., & Achmad, E. (2023). Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Pertumbuhan Ekonomi Melalui Belanja Modal di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2007-2021. *J-MAS (Jurnal Manajemen Dan Sains)*, 8(2), 1875. <https://doi.org/10.33087/jmas.v8i2.1492>
- Maulina, A., Alkamal, M., & Fahira, N. S. (2021). PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH, DANA PERIMBANGAN, BELANJA MODAL, DAN UKURAN PEMERINTAH DAERAH TERHADAP KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH. *Journal of Information System, Applied, Management, Accounting and Research*, 5(2), 390. <https://doi.org/10.52362/jisamar.v5i2.373>

- Miswar, Lianda, P., & Priantana, R. (2021). ANALISIS PENGARUH PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DI ACEH. *Jurnal Mahasiswa Akuntansi Samudra*, 2, 153–169. <https://ejournalunsam.id/index.php/jmas/article/view/3726>
- Nugroho, P., Ma'rif, S., & Putri, N. R. (2021). KELITBANGAN DALAM PEMBANGUNAN BIDANG EKONOMI KOTA SEMARANG. *Jurnal Riptek*, 15(2), 60–68. <http://ripteck.semarangkota.go.id>
- Nooraini, A., Afif, & Yahya, S. (2018). ANALISIS EFEKTIVITAS DAN KONTRIBUSI PAJAK DAERAH SEBAGAI SUMBER PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA BATU (STUDI PADA DINAS PENDAPATAN DAERAH KOTA BATU PROVINSI JAWA TIMUR). *Jurnal Ekonomi & Keuangan Publik*, 5, 89–104. <https://ejournal.ipdn.ac.id/JEKP/article/view/416>
- Pratama, R. A., & Widyastuti, S. (2022). Pengaruh Penerimaan Pajak dan Tingkat Inflasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia. *Veteran Economics, Management, & Accounting Review*, 1(1), 104. <https://doi.org/10.59664/vemar.v1i1.4832>
- Prawiroyudo, M. P., & Suhendro, S. (2018). The Influence Of Economic Growth, Regional Original Revenue, General Allocation Fund And Special Allocation Fund On Capital Expenditure Budget allocation (Empirical Study On Regency And City Governments Throughout Indonesia In 2018-2021). *Management Studies and Entrepreneurship Journal*, 6, 9934–9946. <http://journal.yrpioku.com/index.php/msei>
- Puspitasari, H., Khusaini, M., & Pangestuty, F. W. (2023). ANALISIS PENDAPATAN DAERAH TERHADAP PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO MELALUI BELANJA MODAL KAWASAN GERBANGKERTOSUSILA. *Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara Dan Kebijakan Publik*, 8 (2), 171–187. <https://doi.org/10.33105/itrev.v8i2.487>

- Ridwan, & Nawir, I. S. (2021). *Ekonomi Publik* (M. F. Ridwan, Ed.; 1st ed.). Pustaka Pelajar. <http://eprints2.ipdn.ac.id/id/eprint/721>
- Ridwan, & Saprudin. (2024). *Pembangunan Ekonomi Regional Edisi Revisi* (L. O. A. Dani, Ed.). Yayasan Sahabat Alam Raflesia. <http://eprints2.ipdn.ac.id/1104/1/Pembangunan%20Ekonomi%20Regional%20Edisi%20Revisi%20-%20LY%2024.pdf>
- Rozy, F., Suprayitno, A., & Harsono. (2022). Analisis Pengaruh Pajak dan Belanja Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kota Malang Tahun 2010-2020. *Journal of Regional Economics Indonesia*, 3(2), 16–29. <http://jurnal.unmer.ac.id/index.php/jrei/>
- Solow, R. M. (1956). A Contribution to the Theory of Economic Growth. *The Quarterly Journal of Economics Growth*, 70(1), 65–94. <http://www.jstor.org/stable/1884513>
- Utami, P., & Masyitah, E. (2023). Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Laba BUMD, Dan Belanja Modal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Aceh. *Jurnal MAIBIE (Management, Accounting, Islamic Banking and Islamic Economic)*, 1(1), 82–94. <http://kti.potensi-utama.ac.id/index.php/MAIBIE/index>
- Yossinomita, Y., Effiyaldi, A. F., Mardiana, R., Hassandi, I., Pangestu, M. G., & Fahdillah, Y. (2025). Analysis of Optimal Tax Ratio and Efficiency of Regional Tax Revenue: A Case Study of Provinces in Indonesia. *Journal of Tax Reform*, 11(1), 74-99. <https://doi.org/10.15826/jtr.2025.11.1.193>
- Yüksel, C., & Songur, M. (2025). The Effect of Local Fiscal Variables on Local Economic Growth in Türkiye. *Transylvanian Review of Administrative Sciences*, 21(74), 172-189. <https://doi.org/10.24193/tras.74E.9>
- Yuniarti, P., Wianti, W., & Nurgaheni, N. E. (2020). Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Tingkat Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia. *SERAMBI: Jurnal Ekonomi Manajemen Dan Bisnis Islam*, 2(3), 169–176. <https://doi.org/10.36407/serambi.v2i3.207>

Yurianto, Y., & Akhmad, T. (2021). Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi DKI Jakarta. *JABE (Journal of Applied Business and Economic)*, 7(4), 436-449. <https://journal.lppmunindra.ac.id/index.php/JABE/article/viewFile/9960/4216>

Waryanto, P. (2017). Pengaruh Belanja Modal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia. *Indonesian Treasury Review: Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara Dan Kebijakan Publik*, 2(1), 35-55. <https://doi.org/10.33105/itrev.v2i1.13>

